

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 042/IMS-SK/V/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN PHPL IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI

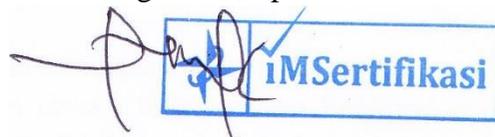
- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 88.000 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 8-16 April 2019
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 6 Mei 2019

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI**
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Audit Khusus.
 7. Audit khusus dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 8. Sertifikat dapat dibekukan apabila terdapat temuan ketidaksesuaian hasil Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 9. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan audit khusus setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Mei 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN KE – 4 (KE EMPAT)
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
IUPHHK HT PT SILVA RIMBA LESTARI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Prasyarat dan VLK : Dasep Gunawan, S.Hut
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut
 - Auditor Sosial : Ir. Surya Mada Bhakti
 - Magang Auditor VLK : Rangga Satriandika Aviala, S Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT SILVA RIMBA LESTARI
- b. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 165/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Silva Rimba Lestari
- c. Luas dan lokasi : luas ± 88.000 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provnsi Kalimantan Timur
- d. Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, RT 001, RW 001, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410. Tlp. (021) 53672792 / (021) 53672895
- e. Susunan Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Roy Gestom Lubi
 - Direktur : Eko Budi
 - Komisaris : Frankie Andrianov Justinu

3. Ringkasan Tahapan :



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Samarinda, 8 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pertemuan Pembukaan	Camp Kembang Janggut, 10 April 2019	<p>Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpikahan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp Kembang Janggut, 10 s/d 13 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Camp Kembang Jangut, 13 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan instansi terkait	Samarinda, 14 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, 6 Mei 2019	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL no. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.1.



5. Resume Hasil Verifikasi :

A. Kriteria Prasyarat

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. SEDANG (2)	1.1.1	Baik (3)	Tersedia dokumen legal PT SRL berupa Akta pendirian perusahaan (Akta Notaris Notaris EliwatyTjitra, SH. No. 233 tanggal 22 Agustus 2008), Akta perubahan terakhir PT SRL (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT SRL No. 21 Desember 2017, Notaris Fellisia, S.H.), dokumen IUPHHK-HTI PT SRL (SK. MENHUT No. SK.165/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011), dokumen Revisi RKUPHHK-HT periode 2011 – 2020 (SK MENHUT No. SK. 36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014), dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018 (SK. Direktur Utama PT SRL No. SK.002/DIR/RKT-SRL/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018), dokumen RKTUPHHK-HT PT SRL tahun 2019 (SK. Direktur Utama PT SRL No. SK.003/DIR/RKT-SRL/X/2018 tanggal 21 Desember 2018), dan dokumen administrasi tata batas areal kerja PT SRL sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah di lakukan (Laporan TBT No. Lp.70/BPKH IV-2/PKH/PLA.0.4/9/2017 Tahun 2017, Surat Permohonan Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SRL No. 073/SRL/LGL/JKT/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, Surat Permohonan Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SRL No. 007/SRL/LGL/JKT/I/2019 tanggal 15 Januari 2019).
	1.1.2	Sedang (2)	Realisasi tata batas PT SRL telah selesai dilaksanakan sepanjang 238.076,98 m dari rencana sepanjang 234.991 m. Tata batas tersebut meliputi batas sendiri, batas persekutuan, batas fungsi kawasan hutan HL. Lilang Mebang Batu Putih (rekonstruksi) dan batas luar kawasan hutan. Tetapi, masih terdapat tata batas sepanjang 23.825,03 m (trayek 7'-O'-P'-1'-2'-3'-4'-5'-Q) yang legitimasinya masih dalam proses PTB di daerah
	1.1.3	Baik (3)	Dalam areal kerja PT SRL masih terdapat konflik batas antara PT SRL dengan PT Agro Bumi Kaltim (Perkebunan Sawit) berupa tumpang tindih areal seluas ± 5.100 Ha. Disamping itu, masih terdapat klaim lahan oleh sebagian kelompok masyarakat seluas 551,77 Ha (catatan tahun 2018). Terhadap konflik tersebut, PT SRL telah melakukan upaya penyelesaian, baik rapat pertemuan yang di fasilitasi oleh KemenLHK (konflik tumpang tindih areal) maupun melalui pendekatan kepada masyarakat dan pemberian GRIT (konflik klaim lahan). Berdasarkan data hasil upaya penyelesaian klaim lahan pada periode tahun 2018, menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu. PT SRL juga memiliki dokumen Matrik Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Tingkat IUPHHK, Tingkat Desa, dan Tingkat Kasus. Data tersebut merupakan landasan dalam penyusunan rencana dan pengambilan langkah resolusi/penyelesaian konflik tersebut.
	1.1.4	Sedang (2)	Terdapat perubahan fungsi kawasan di dalam areal kerja PT SRL. Terhadap adanya perubahan tersebut, PT SRL sedang melakukan perubahan/revisi RKU tahun 2011 sd 2020. Perubahan perencanaan (RKU) tersebut telah diusulkan kepada instansi berwenang (KemenLHK) tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan /persetujuan oleh pejabat yang berwenang
	1.1.5	Baik (3)	Dalam areal kerja PT SRL terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) A.n. PT Bumi Alam Raya (PT BAR) yang merupakan perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 34/1/IPPKH/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017 seluas ± 1.165,97 Ha dan adanya penanaman sawit oleh PT Agro Bumi Kaltim dengan luas ± 5.100 Ha. Terhadap adanya kegiatan tersebut, telah dilakukan upaya untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang (Surat Direktur PT SRL No. 040/SRL/LGL/JKT/V/2018 tanggal 31 Mei 2018) dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin melalui kegiatan perlindungan dan pengamanan areal kerja.
1.2. BAIK (3)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi PT SRL yang merupakan visi dan misi Araya Bumi Indonesia Group untuk level Wood Derivaties Industries. Dokumen visi dan misi tersebut telah di sahkan <i>Chief Operational Officer</i> (COO) dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) PT SRL tanggal 18 April 2017. Rumusan Visi dan misi PT SRL tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, yaitu melakukan pengelolaan hutan tanaman dengan mempraktekan prinsip-prinsip kelestarian hutan baik prinsip kelestarian produksi, ekologi dan sosial.
	1.2.2	Baik (3)	Pada periode tahun 2018, Sosialisasi visi dan misi PT SRL telah dilakukan kepada seluruh karyawan PT SRL dan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan adanya Absensi sosialisasi visi dan misi kepada karyawan PT SRL tanggal 18 Maret 2019 dan dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan kepada masyarakat No. 006/BA-SOS/SRL/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.
	1.2.3	Sedang (2)	Implementasi PHL PT SRL sebagian besar telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial, namun pada sebagian implementasi PHL belum sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT SRL yang telah ditetapkan tersebut. Beberapa implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT SRL antara lain realisasi tata batas yang belum temu gelang, revisi RKUPHHK-HTI periode 2011 – 2020, realisasi produksi yang masih rendah, dan kesehatan finansial yang masih rendah).
1.3 BAIK (3)	1.3.1	Baik (3)	Keberadaan GANIS PHPL IUPHHK-HT PT SRL tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Jumlah tersebut telah melebihi persyaratan (120%).
	1.3.2	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SRL periode tahun 2018 tercapai sebesar 76,92% atau sebanyak 10 (sepuluh) orang dari rencana peningkatan kompetensi SDM PT SRL pada periode tersebut.
	1.3.3	Baik (3)	PT SRL memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen tersebut diantaranya Peraturan Perusahaan periode tahun 2018 s/d 2020 (Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 674/PHIJSK-PK/PP/V/2018, tanggal 23 Mei 2018), Kartu kepesertaan jaminan sosial karyawan (BPJS Kecelakaan Kerja/JKK, BPJS Pensiunan/JHT, BPJS Kesehatan/JKN, dan Group Health Care), Surat Keputusan HRD Division Head dan Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
1.4. BAIK (3)	1.4.1	Baik (3)	Terdapat struktur organisasi dan job deskripsi PT SRL yang telah disahkan oleh Pimpinan perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur Organisasi PT SRL terdiri-dari Struktur Organisasi Head Office (Kantor Pusat), Struktur Organisasi Region Office dan Struktur Organisasi District Manajemen Office (Distrik). Struktur organisasi PT SRL tersebut disusun sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari yaitu menjamin adanya kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial.
	1.4.2	Baik (3)	PT SRL telah menerapkan dan memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. SIM yang telah



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			diaplikasikan oleh PT SRL terdiri dari Program SAP (<i>System Application and Product In Data Processing</i>), SIPUHH Online, SEHATI, SI-PNBP, FMIS (<i>Forestindo Management Information System</i>), SIPONGI, Sistem pelaporan (SIMPEL), Aplikasi .Forestindo, Araya Bumi Information System (abis.forestindo.app), Peralatan Komunikasi Suara/Voice, Peralatan Komunikasi Data/Jaringan Data, SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang diterapkan, serta Struktur organisasi dan Job Description. Dalam rangka mengimplementasikan Sistem Informasi tersebut di atas, PT SRL telah memiliki tenaga pelaksana pada masing-masing tugas dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi dan Daftar Karyawan PT SRL.
	1.4.3	Baik (3)	PT SRL memiliki SPI/Internal Auditor yang berkedudukan di Kantor Pusat Jakarta dan bertanggung jawab secara langsung kepada CEO (Chief executive officer) PT SRL. Audit internal dari kantor pusat tersebut melakukan audit dilakukan terhadap penggunaan anggaran kegiatan di lapangan (keuangan). Disamping internal audit keuangan, PT SRL juga memiliki Internal Auditor Integrated Management System (IMS) yang dilakukan oleh Forest Management Certification Department. Tim Internal Auditor IMS ini berkedudukan di Region Office (RO) di Balikpapan. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Internal Auditor PT SRL, pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (2018) Internal Auditor PT SRL tersebut di atas telah efektif melakukan kegiatan audit internal terhadap seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan
	1.4.4	Baik (3)	PT SRL telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen secara konsisten berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Tindakan pencegahan dilakukan melalui penyempurnaan SOP pelaksanaan seluruh tahapan sistem silvikultur, penyediaan tenaga teknis PHPL sesuai ketentuan yang berlaku, peningkatan kompetensi SDM serta secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi. Tindakan perbaikan dilakukan terhadap temuan hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan. Rencana dan hasil tindakan perbaikan tersebut tercatat dalam dokumen Respon Internal Audit (<i>Management Comment</i>) untuk masing-masing <i>Section/ Department/Division</i> .
1.5. BAIK (3)	1.5.1	Baik (3)	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen perencanaan (RKUPHHK-HTI PT SRL periode 2011 – 2020 dan RKTUPHHK periode tahun 2018 serta 2019) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut tanggal 14 November 2011, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Pulau Pinang, Kecamatan Kembang Janggut tanggal 06 Februari 2012, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Lalang, Kecamatan Tabang (Perjanjian No. 004/SRL/LGL/SMD/06/2013 tanggal 22 Juni 2013), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Muara Ritan, Kecamatan Tabang (Perjanjian No. 035/SRL/SPK-CORA/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017), Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 PT SRL tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 PT SRL tanggal 15 Maret 2019.
	1.5.2	Sedang (2)	Pihak yang telah menandatangani persetujuan batas areal kerja PT SRL dalam Berita Acara Tata Batas PT SRL terdiri-dari Desa Buluq Sen, Desa Bengen, Desa



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Muara Ritan, Desa Pulau Pinang, Desa Lamin, Telihan, Desa Long Beleh, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut (72,72%). Sedangkan yang tidak turut serta dalam penandatanganan dokumen tersebut diantaranya Desa Long Lalang, Desa Bukit Layang dan Desa Kembang Janggut.
	1.5.3	Baik (3)	Rencana dan realisasi CSR/CD/Kelola Sosial PT SRL periode tahun 2018 telah mendapatkan persetujuan dari para pihak. Hal ini dibukti dengan tersedianya dokumen perencanaan CSR/CD/Kelola Sosial PT SRL periode tahun 2018 (RKUPHHK-HTI PT SRL periode 2011 – 2020 dan RKTUPHHK periode tahun 2018 serta 2019) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut tanggal 14 November 2011, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Pulau Pinang, Kecamatan Kembang Janggut tanggal 06 Februari 2012, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Lalang, Kecamatan Tabang (Perjanjian No. 004/SRL/LGL/SMD/06/2013 tanggal 22 Juni 2013), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Muara Ritan, Kecamatan Tabang (Perjanjian No. 035/SRL/SPK-CORA/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017), Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Program Community Investment PT SRL Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Program Community Investment PT SRL Tahun 2019 (No. 002/BA-SOS/SRL/III/2019 tanggal 15 Maret 2019
	1.5.4	Baik (3)	Proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT SRL telah mendapatkan persetujuan dari para pihak. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI PT SRL periode 2011 – 2020) dan jangka pendek PT SRL (RKTUPHHK periode tahun 2018) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut tanggal 14 November 2011, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Pulau Pinang, Kecamatan Kembang Janggut tanggal 06 Februari 2012, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Lalang, Kecamatan Tabang (Perjanjian No. 004/SRL/LGL/SMD/06/2013 tanggal 22 Juni 2013), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Muara Ritan, Kecamatan Tabang (Perjanjian No. 035/SRL/SPK-CORA/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017), Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT SRL Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT SRL Tahun 2019 (No. 003/BA-SOS/SRL/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

B. Kriteria Produksi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1	Baik (3)	Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) A.n PT SRL untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 – 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014. Penyusunan dokumen tersebut telah mempertimbangan deliniasi mikro yang disusun tahun 2011, terutama dalam penetapan tata ruang areal kerja. PT SRL tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.1.2	Sedang (2)	PT SRL telah melakukan penataan areal kerjanya dalam Blok dan Kompartemen/Petak tebang dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disahkan. Luas realisasi PAK PT SRL tahun 2018 telah sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HT (realisasi PAK tanaman Pokok sebesar 87%, Tanaman Kehidupan terealisasi sebesar 48% dan PAK Kawasan Lindung/Buffer Zone/Sempadan Sungai terealisasi sebesar 50%. Berdasarkan lokasi, realisasi PAK tahun 2018 menunjukkan hanya sebagian ($\geq 50\%$) areal sesuai dengan rencana PAK pada dokumen RKUPHHK-HT 10 (sepuluh) tahun periode 2011 - 2020.
	2.1.3	Baik (3)	Penandaan batas blok/kompartemen/petak kerja PT SRL menggunakan papan nama, pal batas (patok) blok/kompartemen/petak, Poletan cat dan atau alur serta jaringan jalan (jalan Utama dan/atau jalan cabang). Tanda batas blok/kompartemen/petak kerja PT SRL dapat terlihat dengan jelas di lapangan
2.2. BAIK (3)	2.2.1	Baik (3)	PT SRL telah memiliki data potensi tegakan untuk seluruh areal kerja berdasarkan hasil Hasil <i>Timber Cruising</i> (Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan) 3 tahun terakhir (tahun 2017, 2018 dan 2019) yang dilengkapi dengan peta pendukungnya (Peta Rencana Kerja dan Peta Realisasi Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada masing-masing periode serta lokasi kegiatan. Peta tersebut dibuat dalam skala 1 : 60.000 dan skala lainnya sesuai dengan cakupan areal.
	2.2.2	Baik (3)	PT SRL telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pertumbuhan dan riap pada PSP di areal kerja untuk masing-masing species (<i>Acacia mangium</i> , <i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Anthocephalus cadamba</i> dan <i>Paraserianthes falcataria</i>) pada masing-masing tahun penanaman. Seluruh data hasil pengukuran tersebut telah di analisis.
	2.2.3	NA	PT SRL belum menyusun perencanaan penebangan (Jatah Tebang Tahunan/JTT) untuk kayu hutan tanaman. Hal ini karena Penanaman tanaman pokok pertama dilakukan pada tahun 2012 (paling tua ditanam pada bulan Juni 2012) dengan jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> , sehingga pada saat ini tanaman tersebut baru memasuki umur 6 tahun. Sesuai dengan daur tanaman pokok yang ditetapkan, bahwa daur tanaman <i>Acacia mangium</i> ditetapkan dengan daur 8 (delapan) tahun tanpa penjarangan, sehingga terhadap tanaman tersebut pada saat ini (tahun 2018) belum dilakukan penebangan. Kegiatan penebangan yang dilakukan PT SRL selama ini adalah penebangan pada areal penyiapan lahan dengan tegakan berupa hutan alam. Penilaian terhadap verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
2.3. BAIK (3)	2.3.1	Baik (3)	PT SRL telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur THPB dan TPTJ dengan lengkap. Isi dokumen SOP tersebut telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis sebagaimana sistem silvikultur yang diterapkan oleh PT SRL.
	2.3.2	Baik (3)	PT SRL telah mengimplementasikan seluruh SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun terdapat SOP tahapan sistem silvikultur belum diimplementasikan secara sempurna tetapi tidak mempengaruhi tahapan kegiatan yang ditetapkan.
	2.3.3	Sedang (2)	Berdasarkan hasil <i>Pre Harvesting Inventory (PHI)</i> yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata potensi tegakan tanaman <i>Acacia mangium</i> sebelum masak tebang di areal PT SRL pada saat pengukuran dengan umur tanaman antara 5,4 – 6,7 tahun tercatat sebesar 112,4 m ³ /Ha.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Potensi tegakan tersebut termasuk ke dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil.
	2.3.4	Baik (3)	Data rata-rata potensi permudaan berdasarkan Laporan <i>Plantation Monitoring Assesment</i> (PMA) PT SRL Tahun 2019, menunjukkan data persen hidup tanaman yang ditanam pada tahun 2019 dengan jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> (Akasia mangium) tercapai sebesar 96%, <i>Eucalyptus pellita</i> (Eucalyptus) sebesar 94% dan <i>Paraserianthes falcataria</i> (<i>Sengon</i>) sebesar 79%. Rata-rata persen tumbuh seluruh jenis tercapai sebesar 90%.
2.4. BAIK (3)	2.4.1	Baik (3)	PT SRL telah memiliki dokumen prosedur terkait pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada tahapan perencanaan (SOP Penataan Areal Kerja (PAK), SOP Pemetaan GIS dan Pemeliharaan Database, SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) – Hutan Alam, SOP <i>Pre Harvesting Inventory</i> , SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Pembuatan Jalan dan Jembatan); tahapan operasi pemanenan (SOP Persiapan Areal Tanam dan Penanaman, SOP Pemanen Kayu Alam dan SOP Pemanenan Kayu Hutan Tanaman Industri); Tahapan Pemeliharaan, Kesehatan Kamp dan Keselamatan Kerja (SOP Inspeksi Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja); serta tahapan Pasca Pemanenan Kayu (SOP Residual Wood Assesment-HQA).
	2.4.2	Baik (3)	PT SRL telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan, yaitu tahapan perencanaan pemanenan (PAK, Pembuatan peta rencana pemanenan, ITSP/PHI, PWH), tahapan operasi pemanenan (pemanenan hutan tanaman sesuai dengan teknik yang benar, pembuatan gawangan, pembuatan terasering); tahapan Pemeliharaan, Kesehatan Camp dan Keselamatan Kerja (Inspeksi dan pemeliharaan harian terhadap bangunan Camp, baik kantor, mess karyawan dan bangunan lainnya, pemakaian APD, Penyediaan sarana dan prasarana K3 (APD) dan pengelolaan lingkungan) dan pada tahapan pasca pemanenan kayu (kontrol atas pelaksanaan penebangan/harvesting yang akan diserahkan (<i>Hand Over Area</i>) oleh pihak <i>Harvesting</i> kepada pihak <i>Plantation</i> sudah layak tanam.
	2.4.3	NA	PT SRL belum melakukan kegiatan penebangan hutan tanaman karena tanaman pokok yang ditanam oleh PT SRL pada saat ini belum memasuki umur masak tebang.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1	Sedang (2)	Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PT SRL periode tahun 2018 (Surat Keputusan Direktur Utama PT SRL No. SK.001/DIR/RKT-SRL/I/2018 tanggal 1 Januari 2018), Revisi RKTUPHHK-HTI PT SRL periode tahun 2018 (Surat Keputusan Direktur Utama PT SRL No. SK.002/DIR/RKT-SRL/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018) dan RKTUPHHK-HTI PT SRL periode tahun 2019 (Surat Keputusan Direktur Utama PT SRL No. SK.003/DIR/RKT-SRL/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018). Dokumen RKTUPHHK-HT PT SRL periode tahun 2018 dan 2019 tersebut disusun berdasarkan RKUPHHK-HT PT SRL Periode Tahun 2011 – 2020. Realisasi lokasi blok RKTUPHHK-HTI tidak sepenuhnya mengacu pada RKU yang disahkan.
	2.5.2	Sedang (2)	Tersedia Peta Operasional (Kerja) dan peta rencana kerja jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011-2020) dan jangka pendek (RKTUPHHK-HT tahun 2018 dan 2019). Seluruh peta kerja tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara dan areal yang termasuk ke dalam kawasan lindung (Sempadan sungai, KPPN, KPSL, Buffer Zone HL dan Areal Konservasi Rawa.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kesesuaian RKTUPHHK-HT 2018 dan 2019 dengan RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011 – 2020 hanya sebagian, sehingga peta operasional (operasional) hanya sebagian yang sesuai dengan Peta RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011 – 2020.
	2.5.3	Sedang (2)	PT SRL telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas pada tahun 2019 untuk blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara untuk areal yang diperuntukan sebagai areal tanaman pokok terealisasi sebesar 87%, areal tanaman kehidupan sebesar 48%. Sedangkan penandaan batas Kawasan Lindung berupa <i>Buffer Zone</i> HL, Sempadan Sungai, Kawasan Lindung Rawa, KPPN, KPSL sampai dengan tahun 2019 tercapai sebesar 91,04% dari total yang seharusnya
	2.5.4	Baik (3)	Realisasi produksi PT SRL pada periode 2018 sebesar 89,85% dari total rencana pemanenan. Realisasi volume hasil penebangan tersebut terdiri dari kelompok jenis Meranti sebesar 88,77% dari yang direncanakan, jenis Rimba Campuran sebesar 92,15% dari yang direncanakan dan jenis Kayu Indah sebesar 5,16 % dari yang direncanakan. Sedangkan berdasarkan luas, realisasi produksi pada tahun 2018 tercapai seluas 74% dari total luas rencana produksi pada tahun tersebut. Lokasi penebangan sesuai dengan RKT 2018 yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	Kondisi kesehatan finansial PT SRL pada tahun 2017 terdiri dari Likuiditas tercatat sebesar 185,49%, Solvabilitas sebesar 2,89% dan Rentabilitas sebesar 0,15% (Positif). Laporan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard) Nomor : 132/C/AR-18 tanggal 10 April 2018, menyatakan opini wajar dengan pengecualian
	2.6.2	Sedang (2)	Rata-rata total realisasi alokasi dana PT SRL dalam rangka pengelolaan hutan pada periode tahun 2017 adalah sebesar 98,33% dari total alokasi dana yang direncanakan. Realisasi pendanaan tersebut hanya mencukupi untuk merealisasikan kebutuhan kelola hutan sebesar 58,71% dari yang seharusnya.
	2.6.3	Baik (3)	Rata-rata realisasi alokasi dana pada tahun 2017 diberikan secara proporsional antar bidang kegiatan (realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan $\leq 20\%$), dimana realisasi alokasi dana terbesar terdapat pada kegiatan pendanaan untuk Kegiatan Admin dan Umum sebesar 99,91 % dari total biaya yang direncanakan dan pencapaian terendah terdapat pada pendanaan bidang Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan sebesar 95,53% dari total biaya yang direncanakan. Perbedaan realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tanaman terdapat perbedaan sebesar 4,38 %.
	2.6.4	Sedang (2)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kelola hutan tanaman pada tahun 2017 tercapai sebesar 98,33% dari total alokasi dana yang direncanakan. Realisasi pendanaan tersebut hanya mencukupi untuk merealisasikan kegiatan fisik kelola hutan dengan pencapaian realisasi rata-rata sebesar 58,71%. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kelola kehutanan berjalan lancar tapi tidak sesuai dengan dengan tata waktu, sehingga pencapaian fisik tidak sesuai dengan target yang direncanakan.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.6.5	Baik (3)	Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan PT SRL periode tahun 2017 yaitu tercapai sebesar 96,57% dari total biaya yang direncanakan. Realisasi tersebut, merupakan realisasi dana untuk kegiatan Pembibitan dan Penanaman (penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan).
	2.6.6	Buruk (1)	Realisasi kegiatan Penanaman (tanaman pokok, tanaman kehidupan) PT SRL untuk periode tahun 2018 tercapai seluas 43,26 % dari total rencana penanaman. Sedangkan untuk periode tahun 2019 (data sampai dengan bulan Februari 2019) tercapai seluas 13,39 % dari total luas penanaman yang direncanakan.

C. Kriteria Ekologi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. SEDANG (2)	3.1.1.	Sedang (2)	Kawasan lindung yang dikelola telah ditetapkan sebagaimana penetapannya pada Keputusan Nomor : 002/SRL-SK-ADM/IV/2018 Perihal : Penetapan Kawasan Lindung PT Silva Rimba Lestari Tanggal 2 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Budi Eko Utomo selaku Direktur perusahaan. Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan terdiri dari : buffer zone KL : 1.104 ha; kawasan lindung rawa : 1.253 ha; KPPN : 5.631 ha; KPSL : 2.355 ha dan sempadan sungai 1.310 ha. Jenis dan luas kawasan lindung sebagaimana ditetapkan tersebut sesuai dengan kawasan lindung yang dirinci pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari Periode 2011 s/d 2020. Kondisi biofisik kawasan lindung tidak seluruhnya sesuai, karena belum mencakup seluruh sempadan sungai yang seharusnya dialokasikan sebagai kawasan lindung.
	3.1.2	Baik (3)	Pelaksanaan penataan kawasan lindung untuk periode tahun 2018 dilakukan pada sempadan Sungai Sek dan Pekaw/Buaya dengan panjang yang ditata batas mencapai 48.951 m. Dengan demikian, akumulasi pencapaian penataan batas sampai dengan tahun tersebut mencapai 361.682 m, setara dengan 91,04 % dari total pajang kawasan lindung. Tanda kawasan lindung yang ditemukan dilapangan berupa papan nama dan tanda rintisan berupa tanda silang (X) dengan cat warna merah yang disematkan pada batang pohon
	3.1.3	Sedang (2)	Dari hasil digitasi peta tampalan peta citra satelit IUPHHK-HT PT SRL 8 Oli Komposit Band 654 Path/Row 117/060 Liputan tanggal 14 April 2018 dengan peta RKUPHHK menunjukkan sebagian kawasan lindung masih berhutan yaitu mencapai 9.223 ha atau setara dengan 79,15 % dari total luas kawasan lindung yang ditetapkan. Sempadan sungai Sek dan Pekaw menunjukkan kondisi vegetasi penutupnya sebagian besar berupa semak dan ditemukan sedikit vegetasi tingkat pohon. Areal KPPN yang berbatasan dengan tebangsan 2018 tidak menunjukkan gejala gangguan (kondisi vegetasi masih kompak).
	3.1.4	Baik (3)	Para pihak yaitu pemerintah, manajemen PT SRL dan masyarakat desa sekitar areal kerja telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin. Bukti pengakuan oleh pemerintah berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HT PT SRL.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Bukti pengakuan oleh manajemen PT SRL sendiri berupa dokumen-dokumen kelola kawasan lindung seperti Berita Acara Penataan Batas, Laporan PEngelolaan Kawasan Lindung termasuk Surat Keputusan Nomor : 002/SRL-SK-ADM/IV/2018 Perihal : Penetapan Kawasan Lindung PT Silva Rimba Lestari.</p> <p>Bukti pengakuan oleh masyarakat sekitar areal kerja berupa Nota Kesepakatan Bersama antara PT Silva Rimba Lestari dengan Masyarakat Desa Long Beleh Haloq 2011, Desa Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut 2012, Perjanjian Nomor: 004/SRL/LGL/SMD/06/2013 antara PT Silva Rimba Lestari dengan Masyarakat Desa Long Lalang tanggal 22 Juni 2013, Nota Kesepakatan dengan masyarakat Desa Muara Ritan tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT Silva Rimba Lestari tanggal 22 Maret 2018 dengan masyarakat Desa Long Beleh Haloq dan Desa Pulau Pinang. BA Sosialisasi Kawasan Lindung Nomor : 003/BA-SOS/SRL/III/2019 dari Desa Kahala, Desa Teluk Binjai, Desa Muara Ritan, dan Desa Blok Sen.</p>
	3.1.5	Sedang (2)	<p>Selama periode tahun 2018, terbit dokumen laporan pengelolaan kawasan lindung yaitu : 1). Laporan Kawasan Lindung PT Silva Rimba Lestari Kuartal Ke-I s/d IV Tahun 2018, Berita Acara rehabilitasi kawasan lindung dan; 3). Laporan ANVEG di areal KPPN.</p> <p>PT SRL belum menyusun laporan pengelolaan KPSL dan KPPN sebagaimana diatur pada KEPMENHUT Nomor 375/Kpts-II/1998 dan PETUNJUK PEMBUATAN KPPN oleh APhi Tahun 1992</p>
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	<p>Prosedur perlindungan hutan yang disusun PT SRL terdiri dari 19 jenis yaitu : 1). SOP Perlindungan Hutan No. SRL/SOP/HSE/019; 2). SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan No. SRL/SOP/HSE/022; 3). SOP Analisa Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan No. SRL/SOP/HSE/023; 4). SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan No. SRL/SOP/HSE/024; 5). SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan No. SRL/SOP/HSE/025; 6). SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasca) No. SRL/SOP/HSE/026; 7). SOP Monitoring HPT Di Area Plantation No. SRL/SOP/R&D/015; 8). SOP Verifikasi Serangan HPT Di Areal Plantation No. SRL/SOP/R&D/016; 9). SOP Pengajuan PK No. SRL/SOP/R&D/017; 10). SOP Pelaporan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman No. SRL/SOP/R&D/018; 11). SOP Operasional Nursery No. SRL/SOP/NSR/001; 12). SOP Operasional Nursery Sengon No. SRL/SOP/NSR/003; 13). SOP Operasional Nursery Eucalyptus sp No. SRL/SOP/NSR/004 dan; 14). SOP Operasional Nursery Jabon No. SRL/SOP/NSR/005</p>
	3.2.2	Baik (3)	<p>Sarana perlindungan hutan PT SRL untuk potensi gangguan yang ada adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana security (Pos CORA, Pos Security, Unit LV double gardan, radia HT dan RIG dan lain-lain); 2) Saran perlindungan hama dan penyakit tanaman berupa paranet, alat semprot, pestisida, gudang penyimpanan racun dan pupuk). 3) Sarana pemadam kebakaran (jenis, jumlah dan kondisinya dengan PERMENLAHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan)
	3.2.3	Baik (3)	<p>Tenaga security PT SRL telah memenuhi ketentuan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93.</p> <p>SDM pemadam kebakaran hutan telah sesuai dengan PERMENHUT Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017.</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.2.4	Baik (3)	<p>PT SRL juga memiliki SDM dengan kualifikasi GANIS tersebut telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHHK/2015.</p> <p>Tindak perlindungan hutan selama periode tahun 2018 disampaikan pada beberapa dokumen laporan yaitu Sosialisasi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada MPA Agustus 2019, Berita Acara Sosialisasi Dan Refresh Pelatihan Pemadaman Kebakaran Masyarakat Peduli Api Desa Pulau Pinang 21 Agustus 2018, Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DALKARHUTLA) PT SRL, April 2018 s/d Maret 2019, Form Serangan Hama Penyakit Tanaman dan lainnya.</p> <p>Realisasinya sesuai dengan potensi gangguan yang ada adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran hutan : Pemadaman kebakaran hutan di areal yang berbatasan dengan Desa Teluk Bingkai, Maret 2019, sosialisasi kebakaran hutan, pembentukan MPA, penempatan pos jaga dan portal di sejumlah titik, penyampaian laporan pengendalian kebakaran secara berkala kepada DISHUT Provinsi KALTIM, BKSDA, BPHP Wil XI Samarinda dan KPHP Samarinda, pembuatan sekat bakar. - Perambahan hutan : pendataan areal klaim baru sosialisasi perlindungan hutan kepada masyarakat desa Long Beleh Haloq dan Pulau Pinang, paroli, pemasangan papan larangan dan pos jaga serta portal, penyelesaian klaim lahan. - <i>Illegal logging</i> : sosialisasi perlindungan hutan, pemasangan papan larangan dan pos jaga serta portal, teguran dan penyitaan barang bukti kayu curian/kayu gesek. - Perburuan satwa liar : sosialisasi perlindungan hutan, pemasangan papan larangan dan pos jaga serta portal. - Serangan hama penyakit tanaman : pelatihan karyawan, pemberdayaan SDM <i>R and D</i>, pemberian fungsida pada media bibit, pemberantasan hama penyakit di persemaian
3.3 BAIK (3)	3.3.1	Baik (3)	<p>Dokumen RKL dan RLP PT SRL telah merinci dampak yang akan ditimbulkan akibat pembangunan hutan tanaman yaitu berdampak terhadap kesuburan tanah (fisika dan kimia tanah) dan erosi tanah (sedimentasi, debit air sungai dan kualitas air).</p> <p>Jenis prosedur yang disusun PT SRL terdiri dari : 1). SOP Pemantauan Kepadatan Tanah dan Pendugaan Erosi No Dokumen : SRL/SOP/HSE/016 tanggal 1 Mei 2012; 2). Pemantauan Kualitas Air No Dokumen : SRL/SOP/HSE/017 tanggal 1 Mei 2012; 3). SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Areal Kerja No Dokumen : SRL/SOP/HSE/020 tanggal 1 Mei 2012; 4). SOP Penebangan Kayu Alam No Dokumen : SRL/SOP/HAR/002 1 April 2013 Rev 1 tanggal 15 April 2014; 5). SOP Persiapan Areal Tanam dan Penanaman No Dokumen : SRL/SOP/PLT/001 1 April 2013 Rev 1 tanggal 3 April 2014; 6). SOP Pembukaan Wilayah Hutan No Dokumen : SRL/SOP/PLG/001 tanggal 1 Juli 2012 Rev 1 tanggal 2 Desember 2013; 7). SOP Pembuatan Jalan dan Jembatan No Dokumen : SRL/SOP/PI/002 tanggal 1 April 2013; 8). SOP <i>Road Construction Assesment</i> (RCA) No Dokumen : SRL/SOP/PLG/009 tanggal 1 April 2013 Rev tanggal 1 November 2013 dan 9). SOP <i>Plantation Monitoring Assesment</i> No Dokumen : SRL/SOP/PLG/005 tanggal 1 April 2012 Rev 1 tanggal 15 April 2014.</p> <p>Prosedur-prosedur tersebut di atas telah mencakup seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.3.2	Baik (3)	<p>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dirinci pada RKL dan RPL berupa 1). Sarana pengelolaan untuk kesuburan tanah; 2). Sarana untuk pengelolaan erosi tanah; 3). Jenis sarana pemantauan dampak.</p> <p>Jenis sarana pengelolaan dan pemantauan dampak PT SRL berupa : windrowing (sisa tebangan yang digunakan untuk mengurangi dampak erosi dan mulsa bagi tanaman pokok), teras sering, saluran drainase, cross drain/sudetan, saluran drainase melintang, gorong-gorong, gudang limbah B3 pupuk, pemadatan jalan, TPS untuk LB3, drum penampung oli bekas, TPA untuk limbah domestik, alat berat seperti excavator, bulldozer dan lainnya termasuk tanaman kacang untuk (LCC), vertiver, bibit Trembesi, Rambutan dan Akar Wangi yang ditanam di pinggir jalan, disekitar menara api dan water ponit.</p> <p>Sarana pemantau dampak : <i>Peilschale</i>, plot erosi, current meter automatic. Sarana pemantau laboratoris lainnya tidak tersedia karena untuk pemantauan fisika dan kimia tanah dan air diserahkan kepada laboratorium yang telah terakreditasi.</p>
	3.3.3	Baik (3)	<p>Bagian dari PT SRL yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan dampak adalah Health, Safety & Enviro Superintendent yang dijabat oleh Lukas Rahadiyan Setiawan. Bagian ini pada tahap pelaksanaan lapangan dibantu oleh bagian Environment Staff yang terdiri dari Siswo Miharjo dan Arimbi Herlena S. Selain itu, bagian Health, Safety & Enviro Superintendent dalam melaksanakan tugasnya juga banyak dibantu oleh bagian Plannig Operation Superintendent (dalam merencanakan kelola lingkungan terutama pada kegiatan penyiapan lahan, <i>road contrukction</i>), Nursery Superintendent dan Plantation Superintendent dalam hal penyiapan bibit dan pelaksanaan kelola vegetatif.</p> <p>Karyawan PT SRL yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT PT SRL telah memenuhi PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHHK/2015 mencapai 100 %.</p>
	3.3.4	Baik (3)	<p>Ketentuan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT SRL dirinci pada dokumen RKL yang disusun tahun 2010.</p> <p>Rencana pengelolaan terhadap dampak kesuburan tanah berupa : penggemburan tanah bekas TPn, penyiapan lahan tanpa membakar, pelaksanaan <i>land clearing</i> tanpa bahan kimiawi, <i>minimum tillage</i>, penambahan pupuk (N,P,K), penyiangan tanaman secara fisik, pelatihan karyawan dan optimalisasi bagian lingkungan.</p> <p>Rencana pengelolaan terhadap dampak Erosi Tanah (Sedimentasi, Debit Sungai dan Kualitas Air) berupa : penyiapan lahan tanpa bakar, pemadatan jalan angkutan, memilih area TPn/TPK yang datar, limbah domestik dikumpulkan dan dibakar, penyediaan penampungan oli bekas (drum) dan <i>oil trap</i>, lantai bengkel dibuat kedap air/disemen dan dibuat saluran drainase, kerjasama dengan instansi terkait, BALITBANG atau perguruan tinggi dan lainnya.</p> <p>Realisasi pengeloaan dampak dilakukan dengan membangun sarana pengelolaan sipil teknis seperti pembuatan rumpukan/<i>windrowing</i>, pembangunan teras sering, saluran drainase, pembutan jebakan sediment dan lainnya termasuk menyediakan sarana (gudang) LB3, TPA untuk limbah domestik, lantai bengkel dan gudang pupuk racun dibangun kedap air.</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>PT SRL telah menyertakan beberapa karyawannya pada pelatihan pelatihan GANIS BINHUT dan bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa pengelola LB3.</p> <p>Implementasi pengelolaan dampak oleh PT SRL terhadap tanah dan air telah sesuai dengan dokumen RKL PT SRL yang disusun tahun 2010.</p>
	3.3.5	Baik (3)	<p>Dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT SRL berupa Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT SRL tahun 2010. Ketentuan pengelolaan mencakup kesuburan tanah, erosi tanah, debit air sungai, sedimentasi dan kualitas air.</p> <p>Implementasi pemantauan oleh PT SRL berupa : pengambilan sampel tanah dan analisa secara laboratorium (pada lab tanah UNMUL), pengamatan visual gejala erosi, pemasangan plot erosi, pengamatan deposisi sedimen dan pemantauan seresah, top soil (disampaikan pada dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2018), penyediaan sarana pemantauan debit air sungai, pengamatan debit dan analisa KRS, pengambilan sampel air dan analisa laboratoris pada Lab Penguji Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Prov Kalimantan Timur.</p> <p>Implementasi pemantauan dampak oleh PT SRL terhadap tanah dan air telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dirinci pada dokumen RPL</p>
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa: (1) Erosi menimbulkan dampak pada tanah terbuka dan jalan angkutan; (2) fluktuasi debit air Sungai Sentekan, (3) dan sedimentasi pada sungai.</p> <p>PT SRL telah melakukan pengelolaan dampak sesuai arahan pada dokumen RKL-RPL PT SRL.</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	<p>Prosedur kerja identifikasi flora fauna berupa Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No SRL/SOP/HSE/015 Revisi Ke 4 tanggal 01 Maret 2019. Prosedur telah mengacu pada PERMENLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas PERMENLHK No. P.20 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi sebagai referensi/acuan kerja identifikasi atas identitas perlindungan jenis flora dan fauna.</p> <p>Mekanisme identifikasi diarahkan pada seluruh flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rared</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik. Dengan demikian, prosedur kerja tersebut telah mencakup seluruh jenis yang ada</p>
	3.4.2	Baik (3)	<p>Data identifikasi potensi flora dan fauna Dokumen Laporan Final Penilaian High Conservation Value (HCV) tahun 2017 diidentifikasi ulang disesuaikan dengan PERMENLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018, CITES dan IUCN terkini.</p> <p>Identifikasi ulang telah dilakukan terhadap seluruh jenis yang ada di areal kerja PT SRL yaitu 56 jenis flora dan 184 jenis fauna.</p>
3.5 BAIK (3)	3.5.1	Baik (3)	<p>PT SRL memiliki prosedur dalam mengelola flora telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berupa: Prosedur kerja pengelolaan flora PT SRL berupa : 1). SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No SRL/SOP/HSE/015; 2). SOP Perlindungan Hutan No SRL/SOP/HSE/019; 3). SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/022; 4). SOP Analisa Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>No SRL/SOP/HSE/023; 5). SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/024; 6). SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/025 dan; 7). SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasca) No SRL/SOP/HSE/026.</p> <p>Bentuk pengelolaan terkait upaya perlindungan berupa: alokasi kawasan lindung, pemasangan papan, tidak menebang pohon dilindungi, inventarisasi jenis dilindungi, perbanyak jenis dan penyuluhan.</p>
	3.5.2	Baik (3)	<p>Implementasi pengelolaan untuk jenis yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin berupa: tidak menebang pohon dilindungi, perbanyak jenis, optimalisasi bagian HSE, sosialisasi kepada operator tebang/kontraktor tentang jenis tidak ditebang, re-identifikasi jenis, patroli perlindungan, penandaan kawasan lindung, ANVEG di KPPN, pemasangan papan nama kawasan lindung sempadan sungai Sek, Pekau dan KPPN dan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat Desa Pulau Pinang, Long Beleh Haloq dan Long Lalang.</p>
	3.5.3	Sedang (2)	<p>Di areal kerja PT SRL masih ditemukan jenis tumbuhan dilindungi seperti Kantung Semar (<i>Nepenthes gracilis</i>), Kantung Semar (<i>Nepenthes reinwardtiana</i> Miq dan Bandang (<i>Borassodendron borneense</i> J.Dransf.). Jenis yang termasuk <i>Critically Endangered/CR</i> seperti Keruing tampudau (<i>Dipterocarpus cornutus</i> Dyer), Keruing daun sempit (<i>Dipterocarpus tempehes</i> Slooten), Bangkirai (<i>Hopea pubescens</i> Ridl.), Cengal (<i>Hopea sangal</i> Korth.) dan Meranti majau (<i>Shorea johorensis</i> Foxw.).</p> <p>Jenis-jenis tersebut kondisinya relatif tidak aman karena beberapa gangguan yang masih terjadi sepanjang tahun 2018 seperti perambahan, <i>illegla loging</i> dan kebakaran hutan dan lahan.</p>
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Baik (3)	<p>Prosedur kerja pengelolaan fauna yang disusun PT SRL berupa prosedur perlindungan dan pengelolaan jenis termasuk pengelolaan habitat bagi satwa berupa 1). SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No SRL/SOP/HSE/015; 2). SOP Perlindungan Hutan No SRL/SOP/HSE/019; 3). SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/022; 4). SOP Analisa Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/023; 5). SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/024; 6). SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/025 dan; 7). SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasca) No SRL/SOP/HSE/026. Tahapan penting dalam pengelolaan jenis berupa alokasi kawasan lindung, alokasi lintasan satwa, pemasangan papan informasi, penyuluhan dan inventarisasi jenis (identifikasi). Dengan demikian, prosedur-prosedur pengelolaan tersebut telah mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi, langka, jaranga, terancam punah dan endemik</p>
	3.6.2	Sedang (2)	<p>Ketentuan pengelolaan fauna sesuai dokumen RKL berupa perlindungan kawasan lindung, pembuatan tanda batas, penyuluhan dan patroli perlindungan. Sedangkan di areal KPPN dan KPSL ditentukan pengelolaannya berupa inventarisasi jenis, patroli, pemasangan papan dan pelatihan.</p> <p>Implementasi pengelolaan berupa mengarahkan kegiatan <i>land clearing</i> ke areal berhutan untuk menggiring satwa, perlindungan dengan patroli, pembuatan tanda kawasan lindung KPPN dan sempadan sungai, memasang papan larangan berburu, pemberian penghargaan kepada kontraktor berprestasi, re-didentifikasi jenis, mempertahankan jenis pohon tertentu di kompartemen sebagai pakan satwa, sosialisasi kepada masyarakat Desa Pulau Pinang, Long Beleh Haloq dan Long Lalang.</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Wajib kelola yang belum terealisasi sesuai ketentuan adalah inventarisasi potensi jenis fauna di areal lindung KPPN dan KPSL
	3.6.3	Sedang (2)	<p>Sesuai data hasil re-identifikasi fauna, diperoleh informasi di areal kerja PT SRL masih menyisakan jenis-jenis fauna yang dikategorikan dilindungi, langka, jarang dan terancam punah seperti Kucing Hutan (<i>Felis bengalensis</i>), Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>), Trenggiling (<i>Manis javanicus</i>), Tarsius (<i>Tarsius bancanus</i>) dan lainnya.</p> <p>Jenis-jenis satwa yang ada di areal kerja pemegang izin kondisinya relatif tidak aman terutama jenis-jenis yang telah mulai jarang ditemui di dalam areal seperti jenis-jenis yang langka. Penyebabnya adalah gangguan terhadap habitat berupa perambahan hutan, kebakaran hutan dan <i>illegal logging</i> yang masih terjadi di tahun 2018.</p> <p>Upaya perlindungan yang dilakukan pemegang izin berupa penandaan kawasan lindung, pemasangan papan nama, patroli, sosialisasi kawasan lindung, pemadaman kebakaran dan lainnya.</p>

D. Kriteria Sosial

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1. BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	<p>Database sosial PT SRL telah lengkap dan jelas dalam dokumen-dokumen Laporan Penilaian HCV, Hasil Pemetaan Pemanfaatan Lahan Masyarakat Sekitar Areal PT SRL dan Laporan Kajian Sosial Komunitas Sekitar Areal PT SRL. Data dan informasi berupa pola penguasaan dan pemanfaatan lahan serta kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar.</p> <p>Dokumen perencanaan program kelestarian fungsi sosial terdiri dari RKUPHHK periode 2011-2020, RKT 2018 dan Rencana Program CSR Comvest Department PT SRL 2018.</p>
	4.1.2	Baik (3)	<p>Pada pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik lahan dan penentuan batas dan luas klaim lahan oleh masyarakat serta penanganan konflik, PT SRL berpedoman pada Mekanisme Penataan Batas Persekutuan Antara Perusahaan dan Masyarakat. Acuan tersebut di terbitkan pada April 2014 dan SOP Pemetaan dan Penyelesaian Konflik Sosial, SRL/SOP/CA 001 Revisi 01, 2018. Standar prosedur yang digunakan legal dan sah, serta relevan dengan kondisi areal lingkup perusahaan.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat, yakni SOP Program Ekonomi, No.Dok SRL-SOP-CA 003; SOP Program Kesehatan, No.Dok SRL-SOP-CA 005; SOP Program Pendidikan, No.Dok SRL-SOP-CA 006 dan SOP Program Karikatif No.Dok SRL-SOP-CA 004; SOP Pembayaran Fee Kayu, No.Dok SRL-SOP-CA 009; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, No.Dok SRL-SOP-CA 011; dan SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT)/Tali Asih, No.Dok SRL-SOP-CA 007.</p>
	4.1.4	Baik (3)	<p>PT SRL telah melakukan penandaan batas areal kerja dengan seluruh lahan klaim masyarakat Desa Long Bleh Haloq dan Desa Pulau Pinang, sehingga batas antara lahan efektif perusahaan dengan lahan masyarakat terlihat jelas dan tegas.</p>
	4.1.5	Baik (3)	<p>PT SRL telah melakukan kegiatan penataan batas partisipatif pada seluruh lokasi di dalam areal konsesi, yakni batas antara lahan yang dikuasai kelompok tani Banua Etam dengan areal tanaman kehidupan Long Beleh Haloq dan batas antara lahan masyarakat di sekitar Sungai Tebeq dengan</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>areal tanaman pokok. Berita Acara penataan batas partisipatif ditandatangani para pihak yakni klaimer, unsur pemerintahan Desa Long Beleh Haloq dan Pulau Pinang, ketua adat dan pihak PT SRL.</p> <p>Di dalam areal PT SRL terdapat konflik lahan berupa penguasaan lahan oleh masyarakat, namun dapat dikelola dengan baik</p>
4.2. BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	<p>Terkait dengan tanggung jawab sosial, dokumen yang dimiliki PT SRL terdiri dari dokumen yang dikeluarkan pemerintah, dokumen kebijakan dan strategi perusahaan, dokumen database sosial masyarakat adat/masyarakat setempat, dokumen prosedur, dokumen perencanaan serta dokumen yang berisi data dan informasi laporan realisasi kegiatan kelola sosial.</p> <p>Dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
	4.2.2	Baik (3)	<p>Standar operational procedure yang dimiliki PT SRL lengkap, jelas, legal dan relevan dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. PT SRL memiliki SOP Pembayaran Fee Kayu, No.Dok SRL-SOP-CA 009; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, No.Dok SRL-SOP-CA 011; SOP Program Ekonomi, No.Dok SRL-SOP-CA 003; SOP Program Kesehatan, No.Dok SRL-SOP-CA 005; SOP Program Pendidikan, No.Dok SRL-SOP-CA 006 dan SOP Program Karitatif, No.Dok SRL-SOP-CA 004.</p>
	4.2.3	Baik (3)	<p>PT SRL telah melakukan penyampaian program Community Investment (Comvest) yang berisi rencana kerja terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH melalui kegiatan sosialisasi RKT 2018, sosialisasi program CSR, sosialisasi batas areal kerja dan pengelolaan tanaman kehidupan.</p> <p>Kegiatan sosialisasi telah mencakup kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan perusahaan yakni masyarakat Desa Pulau Pinang dan Long Beleh Haloq dan Tuana Tuha. Wilayah desa Long Bleh Haloq dan Pulau Pinang masuk kedalam Blok RKT sesuai dengan sesuai dengan Peta RKT UPHHK-HT PT SRL Periode 2011 – 2020, sedangkan Tuana Tuha membawahi areal <i>logpond</i>.</p>
	4.2.4	Baik (3)	<p>PT SRL telah merealisasikan seluruh rencana kegiatan pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat, baik rencana kegiatan kelestarian fungsi sosial yang terdapat pada Dokumen RKT 2018 mau pun rencana program CSR oleh departement Community Investmen PT SRL Tahun 2018.</p> <p>Seluruh item atau jenis kegiatan empat pilar kegiatan comvest, dapat direalisasikan dapat diverifikasi bukti kegiatannya.</p>
	4.2.5	Baik (3)	<p>Realisasi pemenuhan kelestarian fungsi sosial dan realisasi program CSR Comvest Departement PT SRL tahun 2018 terdokumentasi secara lengkap dan jelas. Dokumen utama adalah Laporan Tahunan Community Invesment Tahunan 2018; Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Program CSR Comvest 2018 ; Rekapitulasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Program CSR Comvest 2018. Laporan dilengkapi dengan Berita-berita Acara serah terima bantuan, Berita acara penyelesaian kegiatan, Berita acara serah terima ganti rugi/tali asih. Selain itu, setiap kegiatan difoto secara spesifik yang selanjutnya menjadi salah satu lampiran dokumen/laporan kegiatan termaksud</p>
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik (3)	<p>Dokumen Laporan Dampak Keberadaan PT SRL Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Sekitar Konsesi Tahun 2018 dan Laporan Tahunan Program Comvest PT SRL Tahun 2018 memberikan gambaran secara lengkap dan jelas data dan informasi tentang kelompok-kelompok</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan tanaman yang dijalankan PT SRL.
	4.3.2	Baik (3)	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang dimiliki dan dikembangkan PT SRL adalah MoU dengan masyarakat desa, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan SOP Program ekonomi dan Pelatihan Ketrampilan. SOP-SOP tersebut menjadi acuan seluruh kegiatan program CSR, baik yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan (peningkatan peranserta) maupun bidang perekonomian masyarakat (peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat).
	4.3.3	Baik (3)	Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dituangkan dalam Dokumen RKT 2018 dan Rencana Program CSR Comvest Departement PT SRL Tahun 2018. Rencana yang ada merupakan penjabaran dari Dokumen RKUPHHK-HT 2011-2020.
	4.3.4	Baik (3)	Implementasi kegiatan peningkatan peran masyarakat berupa kegiatan rekrutmen karyawan lokal, pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api, pelatihan pemadaman kebakaran dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Program terkait peningkatan aktivitas ekonomi antara lain kerjasama dengan KSU Anugrah Alam Persada Desa Pulau Pinang dan KSU Tunas Harapan Desa, Desa Long Beleh Haloq; kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan, pembangunan pabrik mini pengolahan singkong gajah dan perbaikan infrastruktur desa. Implementasi rencana kegiatan pengelolaan sosial yang terkait dengan peningkatan peran serta (3 kegiatan) dan aktivitas ekonomi masyarakat adat/masyarakat setempat (5 kegiatan) sepanjang tahun 2018 adalah 87,50 %.
	4.3.5	Baik (3)	Pelaksanaan distribusi manfaat kepada karyawan, masyarakat dan pemerintah oleh PT SRL terdokumentasi secara lengkap, baik dalam bentuk laporan maupun berupa Berita Acara Serah Terima Bantuan, Serah terima Penyelesaian Kegiatan, kuitansi pelunasan kewajiban, dan foto-foto visual kegiatan. Beberapa dokumen terkait antara lain Laporan Realisasi Program CSR PT SRL Tahun 2018, Database Karyawan Bulan April 2019, Surat Bukti Lunas Pembayaran PSDH/DR dan PBB.
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	Pada proses penyelesaian konflik, PT SRL menggunakan acuan SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial dan SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh/Tali Asih Kedua SOP legal dan relevan dengan kondisi areal lingkup perusahaan.
	4.4.2	Baik (3)	Potensi konflik yang teridentifikasi di areal konsesi dipetakan dalam bentuk Peta Potensi Konflik tingkat desa dan tingkat IUPHHK. Peta tersebut dilengkapi dengan informasi tenurial dan informasi lain yang terkait dengan potensi konflik yang dipetakan. PT SRL juga telah menyusun Pemetaan Land Claim Masyarakat Desa Pulau Pinang dan Desa Long Beleh Haloq serta ground Survey areal RKT 2018 di wilayah Desa Pulau Pinang dan Desa Long Beleh Haloq.
	4.4.3	Baik (3)	Tersedia struktur kelembagaan penanganan konflik PT SRL. Keanggotaan tim pada struktur organisasi Penanganan Konflik PT SRL sangat lengkap dan memiliki kompetensi. Selain itu terdapat koordinasi dengan pihak eksternal seperti pemerintahan kecamatan/desa. Terdapat alokasi dana untuk membiayai resolusi konflik yang telah termuat dalam dokumen rencana program community investmen perusahaan.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.4.4	Baik (3)	Pada tahun 2018 PT SRL berhasil menyelesaikan kasus konflik lahan dengan Desa Pulau Pinang. Kronologis penyelesaian kasus mulai dari awal tuntutan klaimer hingga resolusi konflik yang disepakati, berikut berita acara kesepakatan dan dokumentasi visual proses penyelesaian, terekam dan terdokumentasi dengan baik, lengkap dan jelas. Laporan kegiatan pelaksanaan penyelesaian konflik terdapat pada Dokumen Land Claim Cronologi, dan Rekapitulasi klaim lahan PT SRL Tahun 2018
4..5. BAIK (3)	4.5.1	Baik (3)	Implementasi hubungan industrial dalam lingkup PT SRL dalam bentuk penerbitan Dokumen Peraturan Perusahaan, pembuatan Surat Perjanjian Kerja, kebebasan bagi karyawan untuk berserikat dan/atau membentuk serikat pekerja serta membuat mekanisme penyampaian keluhan kesah karyawan dengan menerbitkan Form Keluh Kesah yang dapat diisi oleh seluruh karyawan. Penerbitan Dokumen peraturan perusahaan (PP) dan surat perjanjian kerja (SPK) adalah sesuai dengan ketentuan perundangan ketenagakerjaan
	4.5.2	Sedang (2)	Pada tahun 2018 PT. SRL menyusun rencana pengembangan kompetensi karyawan. Kegiatan training yang direncanakan sebanyak 13 kegiatan hanya terealisasi sejumlah Sembilan (9) kegiatan atau 69,23 %.
	4.5.3	Baik (3)	PT SRL memiliki ketentuan tersendiri mengenai peningkatan jenjang karir karyawan dalam Dokumen Peraturan Perusahaan. Implementasi jenjang karir yang berlaku di lingkup PT SRL sesuai Peraturan Perusahaan dan mengacu pada SOP Promosi dan Demosi Karyawan; SOP Penilaian Kinerja Karyawan. Pada tahun 2018 dilaksanakan beberapa rotasi karyawan dalam bentuk mutasi dan promosi. Mutasi dan promosi karyawan dilakukan atas keputusan direksi
	4.5.4	Baik (3)	Standar tingkat kesejahteraan karyawan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT SRL Periode 2016 -2018. Seluruh ketentuan terkait tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan. Fasilitas untuk karyawan di Basecamp Distrik Kembang Janggut disediakan secara lengkap dan memadai. Seluruh karyawan tercatat sebagai peserta asuransi dan menjadi anggota program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

E. VLK-Hutan

Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ 11.1.	1.1.1 a	Memenuhi	Tersedia dokumen IUPHHK-HTI PT SRL yang sah dan lengkap berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. SK.165/Menhut-II/2014 tanggal 4 April 2014 yang dilengkapi dengan peta areal kerja IUPHHK-HTI PT SRL dengan skala 1 : 100.000. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), menunjukkan bahwa sebagian besar 85.117 Ha (96,72 %) areal kerja IUPHHK-HTI PT SRL merupakan areal Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Areal lainnya (APL dan HL) tidak dimasukkan ke dalam areal yang produktif untuk produksi,



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Areal kerja PT SRL sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan hutan produksi.
	1.1.1 b	Memenuhi	Iuran IUPHHK-HT PT SRL telah dibayarkan sesuai SPP yang dibuktikan dengan tersedianya bukti pembayaran berupa Aplikasi Kiriman Uang dengan nomor Resi : TF 840976, tanggal 10 Mei 2011 melalui Rabobank Internasional ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Pembayaran tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK atas nama PT SRL yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor No. S.438/VI-BIKPHH/2011, tanggal 9 Mei 2011.
	1.1.1 c	Memenuhi	PT SRL memiliki data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Kegiatan tersebut berupa adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) A.n. PT Bumi Alam Raya (PT BAR). PT BAR merupakan perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 34/1/IPPKH/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan HP dan HPK A.n PT Bumi Alam Raya, di Kab Kukar, Prov Kaltim seluas ± 1.165,97 Ha.
P2/ K2.1/ I2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2011 – 2020 atas nama PT SRL untuk areal seluas ± 88.000 Ha di Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetujui Pejabat yang berwenang berdasarkan No. SK. 36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014, RKUPHHK-HTI tersebut dilampiri dengan Peta RKUPHHK-HTI PT SRL. Tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKTUPHHK-HT) PT SRL Tahun 2018 yang telah disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT SRL No. 001/DIR/RKT-SRL/I/2018, tanggal 1 Januari 2018 dan dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja RKTUPHHK-HTI PT SRL Tahun 2018. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PSRL periode tahun 2019 juga telah disetujui Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT SRL No. 002/DIR/RKT-SRL/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 dan dilampiri dengan Peta Rencana Kerja RKTUPHHK-HTI PT SRL Tahun 2018
	2.1.1 b	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan <i>Carry Over 2017</i> PT SRL yang mengacu pada rencana jangka panjang dan dibuat dengan prosedur yang benar. Peta tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan untuk dokumen RKTUPHHK-HT PT SRL pada periode tersebut (SK Direktur Utama PT SRL No. 001/DIRT /RKT-SRL/I/2018 tanggal 1 Januari 2018) dan perubahannya sebagaimana SK Direktur Utama PT SRL No. 002/DIR/RKT-SRL/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018. Peta-peta tersebut, telah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Lindung berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Perlindungan Rawa, dan Buffer Zona Hutan Lindung. Areal yang tidak boleh ditebang tersebut (Kawasan Lindung) digambarkan dengan pewarnaan yang berbeda (menggunakan warna merah) dengan areal yang direncanakan untuk di tebang sehingga dapat dibedakan antara areal yang tidak boleh ditebang dengan areal yang akan ditebang.



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Areal yang tidak boleh ditebang di lapangan telah ditandai dengan papan nama dan tanda batas (patok/rintisan dan cat polet) yang memisahkan antara areal tersebut dengan areal yang boleh ditebang.
	2.1.1 c	Memenuhi	Tersedia peta blok/petak tebangan berupa Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan <i>Carry Over 2017</i> PT SRL dengan skala 1 : 50.000. Peta tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Direktur Utama PT SRL No. 001/DIRT /RKT-SRL/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 dan perubahannya berdasarkan SK Direktur Utama PT SRL No. 002/DIR/RKT-SRL/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018. Posisi blok tebangan benar sesuai dengan rencana dan telah ditandai dengan papan nama blok/petak
P2/ K2.2/ I2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	Tersedia Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTI) Periode tahun periode 2011 s/d 2020 yang disetujui oleh A.n Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014. Dokumen RKUPHHK-HTI PT SRL tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja RKUPHHK-HA skala 1 : 50.000
	2.2.1 b	Memenuhi	Berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT SRL No. 001/DIRT /RKT-SRL/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 sebagaimana telah direvisi dengan Keputusan Direktur Utama PT SRL No. SK.002/DIR/RKT-SRL/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018, rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dari areal penyiapan lahan pada Areal Bekas Tebangan PT SRL ditetapkan sebanyak 209.999,61 m ³ dengan luasan total 6.134 Ha. Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP) pada periode tahun 2018 tercatat hasil produksi sebanyak 91,58% dari rencana. Pemanfaatan kayu hutan alam tersebut diperoleh dari lokasi penyiapan lahan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disahkan.
P3/ K3.1/ I3.1.1		Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 - Maret 2019) dengan jumlah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) dokumen. Dokumen LHP tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang A.n. Yoga Bramatya Aji, S.Hut. (GANIS PHPL PKB-R dengan register 02223-11/PKB-R/XX/2017 dan diangkat sebagai Petugas Pembuat LHP di PT SRL berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT SRL No. SK 002/SRL/Kpts-DDH/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018), Muh. Amat Safii (GANIS PHPL PKB-R dengan register 02095-13/PKB-R/XX/2016 dan diangkat sebagai Petugas Pembuat LHP di PT SRL berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT SRL No. 003/SRL/Kpts-DDH/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 dan A.n. Syamsul Falah, Amd.Hut. Petugas tersebut merupakan GANIS PHPL PKB-R dengan register 01615-11/PKB-R/XX/2014 dan diangkat sebagai Petugas Pembuat LHP di PT SRL berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT SRL No. 001/SRL/Kpts-DDH/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019. Hasil uji petik fisik kayu di TPK Hutan dan TPK Antara dengan dokumen LHP menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LHP yang telah diterbitkan baik jenis maupun ukurannya.
P3/ K3.1/ I3.1.2		Memenuhi	Pengangkutan kayu PT SRL dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/Logpond dan dari TPK Antara/Logpond menuju ke Industri periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 - Maret 2019) seluruhnya telah dilindungi



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SKSHHK Kayu Bulat (KB/KBS/KBK).</p> <p>Pada periode tersebut, dokumen SKSHHK yang diterbitkan PT SRL untuk pengangkutan dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond, tercatat sebanyak 4.723 dokumen. Sedangkan untuk pengangkutan dari TPK Antara/Logpond menuju industri (<i>Buyer</i>), tercatat sebanyak 52 dokumen.</p> <p>Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam dokumen LMKB dengan dokumen SKSHHK pada periode yang sama menunjukkan adanya kesesuaian.</p>
P3/ K3.1/ I3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	Tanda-Tanda PUHH/ <i>barcode</i> dan nomor batang pada batang kayu yang telah diterapkan oleh PT SRL menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LHP dan SKSHHK pada periode yang sama.
	3.1.3 b	Memenuhi	Terdapat sistem tata usaha kayu yang diterapkan oleh PT SRL mulai dari kegiatan ITSP sampai dengan penandaan identitas kayu serta Tata Usaha Kayu (TUK) melalui SIPUHH Online. Identitas kayu hasil produksi PT SRL dapat ditelusuri melalui tanda yang digunakan pada log kayu, diantaranya nomor dan jenis kayu untuk kayu yang belum di LHP-kan (baru ditebang) dan label/ <i>barcode</i> untuk kayu yang telah di LHP-kan dan telah dibayarkan kewajiban kepada negaranya (PSDH & DR). Identitas tersebut diterapkan secara konsisten.
P3/ K3.1/ I3.1.4	3.1.4.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen SKSHHK KB/KBS/KBK yang lengkap dan sah untuk pengangkutan kayu PT SRL periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 - Maret 2019).</p> <p>Pada periode tersebut, dokumen SKSHHK yang diterbitkan PT SRL untuk pengangkutan dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond, tercatat sebanyak 4.723 dokumen. Sedangkan untuk pengangkutan dari TPK Antara/Logpond menuju industri (<i>Buyer</i>), tercatat sebanyak 52 dokumen.</p> <p>Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam dokumen LMKB dengan dokumen SKSHHK pada periode yang sama menunjukkan adanya kesesuaian.</p> <p>Dokumen SKSHHK pada periode tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang, yaitu A.n. Sarjono (Penerbit SKSHHK dan P3KB), Tendi Suryana, S.Hut (Penerbit SKSHHK), Syamsul Fallah, Amd.Hut (Penerbit SKSHHK) dan Luther Nana Parinding (P3KB).</p>
P3/ K3.2/ I3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 - Maret 2019) tersedia dokumen SPP (Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga) PSDH PT SRL sebanyak 69 (enam puluh sembilan) dokumen rincian tagihan PSDH dan 69 (enam puluh sembilan) dokumen rincian tagihan DR. Rincian tagihan tersebut sesuai dengan jumlah LHP yang disahkan pada periode yang sama.
	3.2.1 b	Memenuhi	PT SRL telah melakukan seluruh pembayaran/pelunasan PNPB PSDH dan DR sesuai dengan SPP atau Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 - Maret 2019). Pembayaran tersebut dibuktikan dengan tersedianya dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR PT SRL.
	3.2.1 c	Memenuhi	PT SRL telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran serta dibayar sesuai dengan ketentuan tarif sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
P3/ K3.3/ I3.3.1	3.3.1.	Memenuhi	Terdapat dokumen Pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) A.n. PT SRL dengan Nomor : 43/UPP/PKAPT/05/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan RI. Nomor PKAPT PT SRL tercatat dengan No. 09.02.1.03626 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2019
P3/ K3.3/ I3.3.2	3.3.2.	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir April 2018 - Maret 2019 PT SRL melakukan pengangkutan kayu dari TPK Antara menuju industri menggunakan alat angkut berupa Kapal. Seluruh kapal angkutan yang digunakan memiliki dokumen Surat Persetujuan Gerakan Kapal (SPGK). Kapal pengangkut kayu PT SRL memiliki identitas yang jelas dan berbendera Indonesia.
P3/ K3.4/ I3.4.1		Memenuhi	PT SRL telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada pada dokumen angkutan (SKSHHK) dan ID Barcode pada batang kayu bulat, dengan nomor IMS-SPHPL-019
P4/ K4.1/ I4.1.1		Memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL PT SRL yang lengkap dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.2/K.556/2010 tanggal 9 November 2010. Dokumen AMDAL PT SRL terdiri-dari : Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku.
P4/ K4.2/ I4.2.1	4.1.2 a	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL PT SRL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL. Dokumen RKL dan RPL PT SRL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 660.2/K.556/2010 tanggal 9 November 2010.
	4.1.2 b	Memenuhi	Pada periode tahun 2018, terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan RKL dan RPL tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RPL dan RKL) periode Semester I dan Semester II tahun 2018. Laporan tersebut telah diserahkan kepada instansi berwenang yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima Laporan RKL & RPL PT SRL periode Semester I dan II Tahun 2018 dari instansi terkait. Realisasi pengelolaan dan pemantauan dilakukan terhadap dampak penting terhadap Fisik Kimia, Biologi, dan Sosial Ekonomi Budaya sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RKL dan RPL.
P5/ K5.1/ I5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP (<i>Standard Operating Prosedure</i>) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT SRL yang telah ditetapkan oleh manajemen PT SRL. SOP terkait K3 tersedia sebanyak 13 (tiga belas) dokumen. pelaksanaan K3 di lingkungan kerja PT SRL merupakan tanggung jawab Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3) PT SRL. Organisasi P2K3 tersebut disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/966/P2K3/ PPK/DTKT/2018 tanggal 09 Juli 2018.



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	5.1.1.b	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang tersedia sesuai dengan kebutuhan karyawan dan berfungsi dengan baik. Beberapa peralatan tersebut diantaranya fasilitas kesehatan (Poliklinik, helm, apar, dan alat pemadam kebakaran).
	5.1.1 c	Memenuhi	PT SRL memiliki catatan/database kecelakaan kerja untuk periode tahun 2018 (Januari – Desember 2018) dan tahun 2019 (Januari – Maret 2019). Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja, PT SRL telah melakukan kegiatan diantaranya pemasangan tanda-tanda K3 di lokasi kegiatan operasional, melakukan <i>Safety Induction</i> ulang kepada korban, Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri), Perbaikan sarana-prasarana K3, dan Pengawasan terhadap pekerja, terutama pada pekerja rawan kecelakaan.
P5/ K5.2/ I5.2.1		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan berserikat terhadap seluruh karyawan PT SRL berupa Memo HRD Head PT SRL No. 219/SRL/ADM-HRD/INT-MM/07/18 tanggal 01 Juli 2018 tentang Kebebasan Berserikat. Hasil wawancara terhadap beberapa karyawan PT SRL ((TUK Spv.-KJG, TUK Staff-KJG dan HSE Spv.KJG), menyatakan bahwa karyawan PT SRL belum memiliki serikat pekerja, namun Manajemen PT SRL memberikan kebebasan kepada karyawannya apabila berkeinginan membentuk serikat pekerja atau tergabung dalam serikat pekerja.
P5/ K5.2/ I5.2.2		Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT SRL periode tahun 2018 s/d 2020 yang ditandatangani oleh Direktur PT SRL pada tanggal 1 April 2018 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 674/PHIJSK-PK/PP/V/2018, tanggal 23 Mei 2018. Dokumen PP tersebut berlaku sampai dengan 4 Juni 2020.
P5/ K5.2/ I5.2.3		Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan PT SRL periode bulan April 2019, diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Simanjuntak Marcus Cristovel, lahir pada tanggal 26 November 1995 (\pm 23 tahun 5 bulan) yang bekerja sebagai Project Maintenance Staff dan mulai bekerja di PT SRL pada 1 Agustus 2018.